



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : **BUDI SANTOSA**
- Jabatan : **KEPALA BADAN**
- NHK : **92835**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/135 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah Seluas 2.380 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 31.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.832.500

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.177.521

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.503.010.021

III. HUTANG Rp. 148.721.900

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.354.288.121

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY SUPRIYONO, S.SOS., MM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 457100

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **782.512.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 89.512.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 288.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/160 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 404.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **130.570.500**

1. MOTOR, YAMAHA MIO 125 CW Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.580.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 79.050.000
3. MOTOR, HONDA AT111121BO1 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.510.000
4. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.485.000
5. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
6. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.745.500

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **18.410.011**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	931.493.011
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	931.493.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.